

***Community Welfare in District / City Governments Obtaining Unqualified, Qualified, Adverse and Disclaimer Opinions in Lampung Province***

**Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Beropini WTP, WDP, *Adverse* dan *Disclaimer* di Propinsi Lampung**

**Khairudin<sup>1)</sup>, Tia Rizna Pratiwi<sup>2)</sup>, dan Syahril Daud<sup>3)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung

<sup>3)</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung  
email: [khairudin@ubl.ac.id](mailto:khairudin@ubl.ac.id)

***Abstract***

*The development of audit opinion obtained by the government of regency/city at Lampung Province to date suggests a positive development, with unqualified opinion indicating the highest opinion from the BPK-RI. This audit opinion results show significant increase for last few years. Further, there are some local governments that have been for more than three years in a row obtaining the opinion of unqualified opinion. However, the development of a positive audit opinion of the local government is not followed by the development of a positive level of welfare. In fact, the Government of Lampung Province is still ranked the fourth lowest in Sumatra as the poorest province. So the audit opinion which is attached to the local government, in particular the perceived unqualified opinion for this community is not prosperous. This research was conducted on the entire local government in Lampung Province for the period of 2011-2015 with the method of comparative analysis, with the data related to the Human Development Index (HDI) of each District/City Government were obtained from BPS Lampung Province and the data in the form of the audit opinion are sourced from the BPK-RI. The results showed that not all local government obtain unqualified opinion automatically related to the increase of the level of the welfare of the community becomes. For this reason, the local government obtaining the unqualified opinion in the financial management should also improve the welfare of the community through an increase in the budget for education, health and other sectors that directly touch on the improvement of the welfare of the community. It is expected the government succeeded not only in financial management but also in development.*

***Keyword:*** *Adverse, Disclaimer, welfare of the community, unqualified opinion, qualified opinion*

**Pendahuluan**

Pada umumnya pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian cenderung berbangga diri dengan keberhasilan tersebut. Hal ini dilakukan karena dengan opini WTP tersebut pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern yang baik, serta walaupun

ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Namun opini WTP ini tidak memiliki hubungan/korelasi yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Akbar dan Djazuli (2015) yang menyatakan bahwa belum ada hubungan yang kuat antara opini audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat. Karena fakta yang terjadi sampai saat ini ada

daerah yang mendapat opini WTP namun indikator-indikator kemiskinan, pengangguran, rasio *gini*-nya masih belum menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Bahkan menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., menyatakan bahwa akan menjadi percuma saja opini WTP yang didapat oleh pemerintah daerah, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin (www.ugm.ac.id/id/berita/11275-perolehan.wtp.belum.disertai.peningkatan.kesejahteraan.rakyat, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP hendaknya harus diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Propinsi Lampung adalah berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI Wilayah Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se- Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2015 menunjukkan hasil yang menggembarakan, dimana BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 9 Pemerintah Kabupaten/Kota dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 6 Pemerintah Kabupaten di Propinsi Lampung (BPK RI, 2016). Namun ternyata perkembangan opini audit dari BPK RI

tersebut tidak sejalan dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat, dimana menurut data dari BPS RI untuk tahun 2015 Pemerintah Propinsi Lampung menempati urutan ke-empat dari belakang sebagai propinsi termiskin se-Sumatera (BPS RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa opini WTP yang melekat pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung ternyata belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an pengukuran kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan (1) tingkat pendapatan perkapita, (2) tingkat pendidikan dan (3) usia harapan hidup yang dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat. Ketiga komponen ini dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* = HDI. Sebagai gambaran dapat dilihat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang merupakan pemerintah daerah yang telah lima (5) kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK, namun tingkat kesejahteraannya belum baik, dimana salah satu indikator kesejahteraan yakni indeks kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung periode 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Periode 2011-2015

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Opini Audit	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kesehatan	68,66	51,98	74,77	56,60	52,52

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung periode 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung yang dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat belum maksimal bahkan cenderung menurun. Sementara menurut Ghozali dan Chariri (2007) tentang teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (kreditor, konsumen, *supplier*, masyarakat, analis dan pihak lainnya). Dengan demikian, sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah selain harus memberi manfaat kepada organisasinya sendiri berupa kinerja pengelolaan keuangan yang baik (WTP), tentunya juga harus bermanfaat bagi *stakeholder* yang lainnya (diantaranya adalah masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan).

Penelitian ini penting dilakukan untuk (1) memberikan informasi yang akurat dan terkini serta menilai keberhasilan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung pasca diperolehnya opini audit (2)

merumuskan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca diperolehnya opini audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Akbar dan Djazuli (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat, serta penelitian Auliyana (2017) yang menyatakan bahwa opini WTP dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang dilakukan terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung yang berjumlah 15 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan adalah data skunder berupa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota periode 2011-2015 yang bersumber dari BPS Provinsi Lampung dan data berupa opini audit yang bersumber dari BPK-RI Wilayah Lampung. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui

metode komparatif dengan cara membandingkan masing-masing tingkat kesejahteraan masyarakat dari masing-masing pemerintah daerah pada masing-masing periode opini audit.

## Hasil Dan Pembahasan

### Perkembangan Opini Audit Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Periode 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat (4) jenis tingkatan opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, yakni (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian; (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian; (3) Opini Tidak Wajar; dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat. Dari ke-empat jenis opini tersebut, opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) merupakan opini tertinggi karena dengan opini WTP pemerintah pusat atau pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern yang baik, serta walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak

material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) adanya kelemahan sistem pengendalian intern; (2) belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib; (3) tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; (4) penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (5) kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dampak dari diperolehnya opini selain WTP atas laporan keuangan pemerintah, antara lain: (1) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah; dan (2) timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Berdasarkan laporan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Propinsi Lampung Periode 2011-2015 diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Opini Audit BPK RI atas LKPD Se-Propinsi Lampung Periode 2011-2015

Pemerintah Daerah	Opini Audit				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Lampung Selatan	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
Lampung Tengah	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
Lampung Timur	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
Lampung Utara	WDP	TW	TW	WDP	WTP
Mesuji	-	WDP	WDP	WTP	WTP

Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Pesisir Barat	-	-	-	TMP	TMP
Pringsewu	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI, 2016

Berdasarkan tabel 2 tentang perkembangan opini audit BPK RI atas LKPD Se-Propinsi Lampung periode 2011-2015 dapat diinformasikan bahwa terdapat suatu perkembangan dan prestasi yang positif bagi pemerintah daerah di Propinsi Lampung dalam pengelolaan keuangannya, dimana sampai dengan tahun 2015 pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya terus bertambah (mencapai 10 pemda, dari 15 pemda yang ada), meskipun pertambahannya masih belum sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada sebagian besar pemda di Propinsi Lampung telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern yang baik. Dari 15 pemda yang ada di Propinsi Lampung, Pemda Lampung Barat, Pemda Tulang Bawang Barat, Pemda Way Kanan, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Metro merupakan pemda/pemkot yang selama periode 2011-2015 secara terus menerus mendapatkan opini WTP dari BPK RI

atas pengelolaan keuangannya. Adapun Pemda Mesuji, Pemda Lampung Utara, Pemda Pringsewu, Pemda Tanggamus dan Pemda Tulang Bawang merupakan pemda yang opini auditnya mengalami peningkatan positif, sedangkan pemda yang lainnya opini auditnya masih belum baik (Pemda Lampung Selatan dan Pemda Lampung Tengah opini auditnya mengalami penurunan).

#### **Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Periode 2011-2015**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Evaluasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia penting

dilakukan untuk menilai keberhasilan pembangunan pada masing-masing propinsi atau negara. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Lampung tentang Indeks

Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah se Propinsi Lampung Periode 2011-2015 diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Se-Propinsi Lampung Periode 2011-2015

Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Mean	Kreteria
	2011	2012	2013	2014	2015		
Lampung Barat	61.92	62.51	63.21	63.54	64.54	63.14	sedang
Lampung Selatan	61.95	62.68	63.35	63.75	65.22	63.39	sedang
Lampung Tengah	64.71	65.6	66.57	67.07	67.61	66.31	sedang
Lampung Timur	64.1	65.1	66.07	66.42	67.1	65.76	sedang
Lampung Utara	62.67	62.93	64	64.89	65.2	63.94	sedang
Mesuji	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	58.33	rendah
Pesawaran	59.44	59.98	60.94	61.7	62.7	60.95	sedang
Pesisir Barat	-	-	58.95	59.76	60.55	59.75	rendah
Pringsewu	64.86	65.37	66.14	66.58	67.55	66.1	sedang
Tanggamus	60.63	61.14	61.89	62.67	63.66	62	sedang
Tulang Bawang	63.67	64.11	64.91	65.83	66.08	64.92	sedang
Tulang Bawang Barat	60.13	60.77	61.46	62.46	63.01	61.57	sedang
Way Kanan	62.04	62.79	63.92	64.32	65.18	63.65	sedang
Bandar Lampung	72.04	72.88	73.93	74.34	74.81	73.6	tinggi
Metro	72.23	72.86	74.27	74.98	75.1	73.89	tinggi

Sumber: BPS RI Wilayah Lampung, 2016

Berdasarkan tabel 3 tentang perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Se-Propinsi Lampung periode 2011-2015 dapat diinformasikan bahwa secara umum Indeks Pembangunan Manusia pada semua pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung selama periode 2011-2015 mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi selama periode 2011-2015 terjadi pada Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran sebesar 0,82, sedangkan pemerintah daerah yang kenaikan Indeks

Pembangunan Manusia terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,40. Namun rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Lampung selama periode 2011-2015 adalah Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 73,89 dan 73,60 dengan kriteria “tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa dari 15 pemerintah daerah di Propinsi Lampung periode 2011-2015 hanya ada 2 pemerintah daerah yang kesejahteraan masyarakatnya sudah relatif

baik, sedangkan sisanya masih sangat membutuhkan perhatian khusus.

Berdasarkan perkembangan opini audit dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Se-Propinsi Lampung periode 2011-2015 dapat dijelaskan bahwa ternyata tidak semua pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia) juga “tinggi”. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama periode 2011-2015 memperoleh opini WTP, namun tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia) berada pada kriteria “sedang”. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meskipun memperoleh opini WTP, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia) lebih baik dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang memperoleh opini WTP. Temuan ini mendukung hasil penelitian Akbar dan Djazuli (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara opini audit dengan kesejahteraan masyarakat, namun tidak mendukung hasil penelitian Auliyana (2017) yang menyatakan bahwa opini WTP dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa opini yang baik belum dapat menjamin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat disuatu daerah sangat ditentukan oleh banyak faktor (diantaranya adalah faktor kepemimpinan,

dukungan anggaran/pembiayaan dan budaya masyarakat).

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak semua pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia) termasuk dalam kriteria “tinggi”. Hal ini karena tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah sangat ditentukan oleh banyak faktor (diantaranya adalah faktor kepemimpinan, dukungan anggaran/pembiayaan dan budaya masyarakat). Untuk itu, maka pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam pengelolaan keuangan hendaknya harus juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kegiatan diantaranya adalah peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya yang menyentuh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan diperoleh pemerintah daerah yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan juga berkualitas dalam pembangunan.

Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah di Propinsi Lampung saja, sehingga hasilnya sangat terbatas. Selain itu, indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat hanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja dan mengabaikan indikator yang lainnya.

## **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini. Serta terimakasih juga kami sampaikan kepada BPS Provinsi Lampung dan BPK-RI Wilayah Lampung yang telah membantu penyediaan data-data penelitian.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad. 2015. Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan, dan Bali Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), pp. 1-19.

Auliyana, Emy. 2017. Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), pp. 22-33.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015.

Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### Buku:

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2016. Bandar Lampung Dalam Angka 2015. Bandar Lampung. BPS Kota Bandar Lampung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. Lampung Dalam Angka 2015. Lampung. BPS Provinsi Lampung.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Ghazali, Imam dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Edisi 3. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York : Oxford University Press.

### Publikasi Ekeltronik

[www.ugm.ac.id/id/berita/11275perolehan.wtp.belum.disertai.peningkatan.kesejahteraan.rakyat](http://www.ugm.ac.id/id/berita/11275perolehan.wtp.belum.disertai.peningkatan.kesejahteraan.rakyat), 2016, diakses 10 November 2017